

# **PROLIFERASI NUKLIR SEBAGAI PENCIPTA PERDAMAIAN DUNIA KONTEMPORER: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

Febry Triantama<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Paramadina  
[febry.triantama408@gmail.com](mailto:febry.triantama408@gmail.com)

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.3427

## **Abstract**

*Nuclear weapons are a form of weapon technology developed that have enormous power. With just a small amount, nuclear weapons can destroy a city through its explosive power and the radiation it emits. The presence of nuclear weapons with all the strength they have and the desire of several countries to develop their nuclear weapons made a debate in International Relations realms. The first opinion states that nuclear proliferation will threaten world stability or peace. Meanwhile, the second opinion is a nuclear proliferation will bring a more peaceful international system. This debate continues today. Through a literature study approach, this article states that the opinion that states nuclear proliferation helps create a more stable and peaceful international world is more relevant to the contemporary international politics.*

**Keywords:** *Nuclear Weapons, Nuclear Proliferation, Peace*

## **Abstrak**

Senjata nuklir merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi persenjataan dengan menghadirkan senjata yang memiliki kekuatan sangat besar. Hanya dengan jumlah kecil, nuklir dapat menghancurkan sebuah kota melalui daya ledaknya dan radiasi yang dipancarkannya. Kehadiran senjata nuklir dengan segala kekuatan yang dimilikinya tersebut serta keinginan beberapa negara untuk mengembangkan senjata nuklirnya sendiri membuka ruang diskusi baru dalam ilmu politik internasional. Pendapat pertama menyatakan bahwa proliferasi nuklir akan mengancam stabilitas atau perdamaian dunia. Sedangkan pendapat kedua adalah proliferasi nuklir sebagai jawaban upaya menciptakan dunia yang damai. Perdebatan tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Melalui pendekatan studi literatur artikel ini menyatakan bahwasanya pendapat yang menyatakan proliferasi nuklir membantu menciptakan dunia internasional yang lebih stabil dan damai masih sangat relevan dengan konteks politik internasional saat ini.

**Kata Kunci:** *Senjata Nuklir, Proliferasi Nuklir, Perdamaian*

## **Pendahuluan**

Dunia internasional pada tahun 1945 dikagetkan dengan kehadiran sebuah senjata yang memiliki kemampuan sangat kuat yakni senjata nuklir. Senjata nuklir sendiri merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi persenjataan dengan menghadirkan senjata yang

memiliki kekuatan sangat besar. Hanya dengan jumlah kecil, nuklir dapat menghancurkan sebuah kota melalui daya ledaknya dan radiasi yang dipancarkannya (Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, n.d.). Hal ini dapat langsung terlihat pada penggunaan pertama kali sekaligus satu-

satunya senjata nuklir oleh Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II tahun 1945 menggunakan bom atom melumpuhkan Jepang dengan menjatuhkan bom nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki. Selain ledakannya yang dapat membunuh banyak manusia, efek dari radiasi yang dikeluarkan dalam jangka panjang sangatlah merugikan bagi kesehatan dan kehidupan di sekitar daerah yang menjadi sasaran. Karena itulah maka tenaga nuklir yang digunakan sebagai senjata dipandang sangat berbahaya (Tomonaga, 2019). Dikarenakan begitu massifnya efek kehancuran yang bisa ditimbulkan dari penggunaan senjata nuklir, maka tidak heran jika senjata nuklir juga dianggap sebagai senjata dengan efek penggentar paling besar. Oleh karena itu tidak heran banyak negara ingin memiliki senjata nuklir.

Kehadiran senjata nuklir dengan segala kekuatan yang dimilikinya tersebut serta keinginan beberapa negara untuk mengembangkan senjata nuklirnya sendiri membuka ruang diskursus baru dalam ilmu politik internasional. Diskursus baru tersebut adalah bagaimana seharusnya dunia merespon hal tersebut. Pemikir-pemikir politik internasional terutama yang berfokus pada aspek keamanan internasional memiliki dua pandangan yang berbeda (Gartzke & Jo, 2009). Pandangan pertama bisa dikatakan sebagai pandangan yang pro-proliferasi nuklir. Menurut pandangan ini keberadaan senjata nuklir justru bisa mendatangkan stabilitas dan perdamaian dunia. Namun dengan catatan bahwa negara-negara di dunia diberi kebebasan untuk mengembangkan teknologi senjata nuklirnya sendiri (Gartzke & Jo, 2009).

Berbeda dari pandangan pertama yang mendorong terjadinya proliferasi

nuklir, pandangan kedua yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Pandangan yang pertama adalah argumen yang menyatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir di dunia harus dibatasi demi menjaga stabilitas keamanan dunia. Hal ini dikarenakan jika semua negara diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir maka ditakutkan akan memicu perlombaan senjata dan bahkan juga perang nuklir. Pandangan ini kemudian memunculkan rezim non-proliferasi nuklir, yang menghasilkan *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) (Gartzke & Jo, 2009). Perdebatan antara para pemikir politik internasional mengenai nuklir belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah argument atau pandangan pro-proliferasi nuklir masih mampu bertahan dan sesuai dengan konteks dunia internasional saat ini?

### **Proliferasi Nuklir Sebagai Kunci Menuju Perdamaian Dunia?**

Keberadaan senjata nuklir yang mengagetkan dunia pada akhir Perang Dunia II telah menghadirkan diskursus baru dalam kajian ilmu hubungan internasional. Hingga saat ini telah terdapat banyak tulisan atau kajian terkait nuklir, terutama proliferasi nuklir. Kajian mengenai bagaimana dampak proliferasi nuklir terhadap perdamaian dunia telah dilakukan oleh beberapa ahli, seperti Kenneth Waltz, John J Mearsheimer dan Victor Asal. Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang akan dijawab maka perlu melakukan kajian literatur terkait dengan proliferasi nuklir.

Kenenth Waltz dengan artikelnya yang dimuat didalam *The Adelphi Papers* dengan judul "*The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better*" menjadi tulisan paling

berpengaruh dalam argumen yang mendukung proliferasi nuklir. Waltz dalam artikelnya tersebut menyatakan ketika terjadi proliferasi senjata nuklir secara perlahan di berbagai negara maka yang akan terjadi adalah kestabilan, bukan perang nuklir seperti yang digaungkan sebelumnya (Waltz, 1981). Argumentasi yang dikembangkan oleh Waltz tersebut bersumber dari suatu premis yakni kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara akan meningkatkan *cost of war*. Peningkatan *cost of war* ini disebabkan oleh kemampuan senjata nuklir menghadirkan efek deterrence yang tinggi serta kemampuan bertahan yang baik. Senjata nuklir meskipun dalam jumlah yang sedikit bisa memberikan daya hancur yang massif. Setiap negara akan menghindari peperangan yang akan menimbulkan kehancuran terlalu massif. Dalam kata lain, senjata nuklir membantu negara mencepahi apa yang Waltz sebut sebagai “*deterrent ideal*”.

Senjata nuklir juga dapat meningkatkan *cost of war* melalui kemampuan pertahanan atau bertahan yang dimiliki. Senjata nuklir dipandang sebagai alat pertahanan yang sangat kuat dan sangat sulit ditaklukan. Pandangan bahwa senjata nuklir menghadirkan pertahanan yang sangat sulit ditaklukan kemudian akan menurunkan probabilitas serangan yang dilakukan negara lain. Hal ini dikarenakan negara pihak musuh memahami serangan yang mereka lakukan akan sia-sia dan akan memberi kehancuran bagi pasukannya. Nuklir akan membawa negara berada pada posisi “*defensive ideal*” hingga akhirnya menciptakan stabilitas atau perdamaian. Oleh karena itu ketika banyak negara diberi kebebasan untuk memiliki senjata nuklir maka *cost of war* antara satu negara dengan negara lainnya akan semakin tinggi. Seiring dengan semakin

tingginya *cost of war* yang tersebut maka perang, terutama perang nuklir bukan lagi menjadi pilihan utama suatu negara.

Selain itu Waltz didalam artikel ini juga memberi bantahan para argument lain yang disampaikan pihak-pihak yang menghendaki non-proliferasi nuklir. Argumen yang dibantah oleh Waltz adalah argument yang menyatakan ketika nuklir dimiliki oleh banyak negara dan kemudian negara tersebut berada dibawah kendali pemimpin otoritarian atau revisionist maka senjata nuklir akan dipergunakan untuk menyerang. Waltz didalam artikel ini membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa bahkan di negara-negara dengan pemimpin otoriter atau revisionis, pemimpin negara tersebut akan cenderung menghindari penggunaan senjata nuklir. Hal ini dikarenakan pemimpin otoritarian ataupun revisionist tersebut memahami bahwa ketika mereka melancarkan serangan nuklir dan harus menghadapi serangan balasan, maka negara yang mereka pimpin akan menghadapi kehancuran. Kehancuran yang diderita termasuk kehilangan banyak warga negara. Kehancuran ini akan berimplikasi pada masa depan kekuasaannya, ketika negara tersebut kemudian hancur atau berada dibawah penguasaan negara musuh, maka kekuasaannya akan ikut berakhir. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh para penguasa otoriter maupun revisionis.

Kenneth Waltz kemudian kembali mempertegas argumentasinya dalam artikel yang dipublikasikan pada tahun 1991. Artikel ini berjudul “*Nuclear Myths and Political Realities*”. Pada artikel ini Kenneth Waltz kembali menyanggah argumen yang menyatakan bahwa proliferasi nuklir akan meningkatkan instabilitas politik internasional atau menyebabkan

peperangan. Waltz menyatakan bahwa ketakutan senjata nuklir akan dipergunakan dalam perang karena gagalnya *deterrence* merupakan suatu kesalahan. Menurut Waltz, kegagalan *deterrence* yang akan mengakibatkan peperangan memang dimungkinkan, namun hanya pada persenjataan konvensional. *Deterrence* yang ditimbulkan dari senjata nuklir menurut Waltz tidak akan berujung pada kegagalan. Negara-negara pemilik senjata nuklir hanya perlu menunjukkan sedikit kesungguhannya melakukan serangan balasan atau *retaliations* atau *second strike* untuk menimbulkan rasa gentar pada negara musuh dan mencegah terjadinya serangan (Waltz, 1990).

Waltz juga menyatakan bahwa dalam era senjata nuklir, elemen lain yang juga penting untuk diperhatikan negara sebelum memutuskan menyerang negara lain adalah kemampuan serangan pertama yang melumpuhkan. Menurut Waltz, ketika suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan pertama yang seketika melumpuhkan lawan maka serangan tidak akan dilakukan. Negara dengan kemampuan serangan pertama yang tidak cukup ini tidak akan mempertaruhkan keselamatannya, karena mereka akan berhadapan dengan serangan balasan atau *retaliations*. Dalam artikel ini Waltz memberi contoh bahkan dengan keunggulan kemampuan nuklir yang dimiliki Amerika Serikat dibanding Uni Soviet, keduanya tidak pernah terlibat perang. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memahami bahwa serangan pertama yang mereka luncurkan tidak menjamin akan cukup untuk melumpuhkan Uni Soviet dan akan berhadapan dengan serangan nuklir balasan.

Selain itu, Waltz juga menyatakan bahwa melalui kepemilikan senjata nuklir akan menghapuskan persoalan "*credibility of deterrence*". Jika pada senjata konvensional keberhasilan *deterrence* masih bergantung apakah *deterrence* tersebut memiliki kredibilitas atau tidak, maka hal tersebut tidak berlaku pada senjata nuklir. *Deterrence* yang dihadirkan senjata nuklir sudah pasti dirasakan oleh negara lain. Dalam kata lain *deterrence* yang ditimbulkan senjata nuklir akan langsung muncul ketika senjata itu hadir. Setiap negara di dunia akan menyadari dampak kehancuran massif yang ditimbulkan oleh serangan nuklir meskipun dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu kepemilikan senjata nuklir juga dapat menurunkan potensi terjadinya perang. Setiap negara akan terbawa kedalam ilusi atau bayang-bayang kehancuran jika terlibat peperangan terutama dengan penggunaan nuklir.

John J Mearsheimer juga menuliskan artikel yang menyatakan pengaruh *deterrence* senjata nuklir terhadap stabilitas dunia internasional. Terdapat setidaknya dua artikel karya Mearsheimer yang menyatakan bahwa proliferasi nuklir dapat membantu menciptakan apa yang disebut sebagai "*long peace*". Artikel pertama adalah artikel yang berjudul "*Nuclear Weapons and Deterrence in Europe*". Pada artikel ini Mearsheimer menyoroiti usulan yang disampaikan beberapa pihak agar NATO menerapkan doktrin "*No First Use*" bagi senjata nuklirnya. Doktrin NFU yang diusulkan ini menyatakan bahwa NATO berkomitmen untuk tidak akan menggunakan senjata nuklirnya dan menerima kekalahan dari Uni Soviet dan Pakta Warsawa, jika diserang pada suatu saat. Doktrin NFU juga disebutkan oleh Mearsheimer bisa berujung hingga denuklirisasi Eropa.

Menurut Mearsheimer jika NATO memutuskan untuk mengadopsi doktrin ini maka NATO akan berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan serta kehilangan *deterrence* terbaiknya (Mearsheimer, 1984).

Mearsheimer menyatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh anggota-anggota NATO di Eropa memiliki peranan yang sangat strategis dan vital. Mearsheimer menyatakan bahwa senjata nuklir merupakan senjata yang mampu menghadirkan *deterrence* sangat baik. Nuklir dapat meningkatkan resiko atau *cost of war* yang harus dikalkulasikan serta ditanggung oleh negara atau pihak musuh jika ingin melakukan serangan. Potensi kerusakan dan kehancuran massif yang menjadi penyusun *deterrence* senjata nuklir kemudian juga mengakibatkan kesulitan pihak manapun memastikan kemenangan jika harus berperang. Oleh karena itu menurut Mearsheimer jika NATO mengadopsi doktrin NFU maka *deterrence* yang dihadirkan akan hilang. Menghilangnya *deterrence* dari senjata nuklir akan membuka peluang Uni Soviet bersama negara Pakta Warsawa melakukan serangan ke Eropa. Hal ini dikarenakan kalkulasi kerugian atau resiko Uni Soviet akan berubah. Uni Soviet tidak lagi dihadapkan pada resiko kehancuran jika memutuskan untuk menyerang anggota NATO. Uni Soviet hanya akan dihadapkan pada level ketakutan biasa.

Mearsheimer dalam artikel tersebut juga menyatakan bahwa premis yang ditawarkan oleh para pengusul doktrin NFU untuk menggantikan *deterrence* yang dihasilkan senjata nuklir dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas senjata konvensional tidak akan berhasil. Dalam paparannya Mearsheimer menyatakan bahwa kekuatan persenjataan konvensional NATO masih belum bisa dipergunakan

untuk memastikan mereka mampu mengimbangi kemampuan Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Selain itu Mearsheimer juga menyatakan bahwasanya meskipun NATO telah mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan dan pertahanan konvensional, *deterrence* yang dihasilkan tidak akan mampu menyaingi *deterrence* dari senjata nuklir (Mearsheimer, 1984).

Artikel kedua yang dituliskan oleh John J Mearsheimer adalah artikel yang berjudul "*The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent*". Pada artikel ini Mearsheimer kembali menyuarkan argumennya bahwasanya proliferasi nuklir – terutama dalam kasus Ukraina – akan membantu menjaga stabilitas. Mearsheimer menyatakan bahwa keinginan berbagai pihak termasuk Presiden Amerika Serikat Bill Clinton untuk menjadikan Russia sebagai satu-satunya negara yang mewarisi senjata nuklir Uni Soviet adalah kesalahan besar. Hal ini dikarenakan seandainya Ukraina tidak lagi memiliki senjata nuklir yang menghadirkan *deterrence* sangat baik dihadapan Russia, maka tidak menutup kemungkinan Russia akan mencoba melakukan penaklukan Ukraina kembali. Terlebih lagi menurut Mearsheimer kehadiran kekuatan Amerika Serikat di Eropa sudah semakin menurun. Russia juga tidak lagi perlu khawatir akan serangan nuklir balasan / *retaliations* yang dilakukan Ukraina. Kemampuan persenjataan maupun pertahanan konvensional Ukraina dipercaya tidak akan mampu menghadirkan *deterrence* guna mencegah Russia melakukan serangan kepada Ukraina. Selain itu tidak menutup kemungkinan pula persaingan antara Jerman dan Russia akan semakin tajam (Mearsheimer, 1993).

Mearsheimer pada artikelnya kali ini memang masih menganggap bahwa

proliferasi nuklir akan membawa dampak positif pada perdamaian dan stabilitas seperti Kenneth Waltz. Namun pada artikel ini juga Mearsheimer sedikit berbeda pandangan dengan Waltz. Mearsheimer menyatakan proliferasi nuklir tidak bisa dilakukan secara bebas. Mearsheimer mendorong terjadinya proliferasi nuklir yang terkontrol, yakni hanya memperbolehkan negara-negara *great powers* untuk memiliki senjata nuklir (Mearsheimer, 1993). Hal ini dimaksudkan agar stabilitas di setiap kawasan lebih terjamin namun juga mencegah serangan nuklir yang tidak diinginkan, misalnya ketika teroris mengambil alih fasilitas peluncuran.

Pandangan yang menyatakan bahwa proliferasi nuklir ke berbagai negara justru akan meningkatkan stabilitas politik internasional juga dapat ditemukan dalam artikel berjudul "*Proliferation and International Crisis Behavior*". Artikel yang ditulis oleh Victor Asal dan Kyle Beardsley ini menyatakan bahwa krisis atau konflik yang terjadi antar negara pemilik senjata nuklir lebih berpeluang berakhir tanpa penggunaan kekerasan. Asal dan Beardsley dalam artikel tersebut juga berargumen bahwa semakin banyak negara memiliki senjata nuklir maka probabilitas terjadinya perang akan semakin kecil (Asal & Beardsley, 2007).

Kesimpulan artikel Asal dan Beardsley seperti yang telah disebutkan sebelumnya didapatkan setelah melakukan analisa terhadap data *International Crisis Behavior (ICB)*. Asal dan Beardsley menemukan bahwasanya jumlah krisis atau konflik yang terjadi berbanding terbalik dengan jumlah negara pemilik senjata nuklir yang terlibat. Dalam kata lain, semakin banyak negara pemilik senjata nuklir yang terlibat, maka berdasarkan data

empirik jumlah krisis yang terjadi semakin sedikit. Sebagai contohnya ketika krisis hanya melibatkan satu negara pemilik senjata nuklir maka bukti empirik menunjukkan terdapat 97 krisis atau konflik yang terjadi. Sedangkan jika negara pemilik senjata nuklir yang terlibat konflik berjumlah 4 negara maka krisis yang terjadi hanya 4 kasus (Asal & Beardsley, 2007).

Artikel Asal dan Beardsley kemudian juga menggali lebih dalam mengenai tingkat keparahan konflik atau krisis yang melibatkan negara-negara di dunia. Asal dan Beardsley membagi tingkat keparahan dalam konflik menjadi 4, yakni tanpa kekerasan, *minor clashes*, *serious clashes* dan perang skala penuh. Berdasarkan temuan Asal dan Beardsley ini kembali diketahui bahwasanya ketika semakin banyak negara pemilik senjata nuklir yang terlibat dalam konflik atau krisis maka probabilitas keparahan konflik menurun pada tiap tingkatannya. Sebagai contohnya adalah probabilitas terjadinya perang skala penuh ketika melibatkan 5 negara pemilik senjata nuklir menurun hingga hampir 300% jika dibandingkan tanpa negara pemegang senjata nuklir. Probabilitas krisis berakhir tanpa penggunaan kekerasan jika melibatkan semakin banyak negara pemilik senjata nuklir juga menunjukkan efek serupa. Ketika krisis melibatkan 3 negara pemilik senjata nuklir maka probabilitas tidak terdapat penggunaan kekerasan 300% lebih besar dibandingkan tidak melibatkan negara pemilik senjata nuklir. Sedangkan pada krisis yang melibatkan 5 negara pemilik senjata nuklir, probabilitas krisis berakhir tanpa penggunaan kekerasan menjadi 500% lebih tinggi dibandingkan tidak ada negara pemilik senjata nuklir yang terlibat (Asal & Beardsley, 2007).

Upaya untuk mengetahui bagaimana dampak proliferasi nuklir terhadap stabilitas maupun perdamaian sistem internasional juga dilakukan oleh Akisato Suzuki. Suzuki menuliskan satu artikel yang berjudul “*Is More Better or Worse? empirics on nuclear proliferation and interstate conflict by random forests*”. Jika penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak proliferasi nuklir ini dilakukan pada *level dyadic* atau *crises level*, Suzuki melakukan analisa pada level sistemik. Menurut Suzuki fenomena proliferasi nuklir merupakan peristiwa yang terjadi pada level sistemik, mengingat proliferasi nuklir berarti semakin banyak negara didalam sistem internasional yang memiliki kemampuan melancarkan serangan nuklir. Suzuki menyampaikan bahwasanya berdasarkan data empirik, argumentasi Waltz dan tokoh lain yang menyatakan proliferasi nuklir meningkatkan stabilitas dapat dibuktikan. Suzuki menyatakan bahwasanya jumlah negara pemilik senjata nuklir yang besar menurunkan kecenderungan sistemik terjadinya perang antar negara. Selain itu Suzuki juga menyatakan bahwasanya kemunculan negara-negara pemilik senjata nuklir baru tidak meningkatkan instabilitas sistem internasional (Suzuki, 2015).

Artikel berikutnya adalah artikel yang ditulis oleh Michael Cohen yang menggunakan Asia Selatan sebagai contoh kasus. Artikel yang berjudul “*How Nuclear South Asia is Like Cold War Europe: The Stability – Instability Paradox Revisited*” ini dituliskan untuk membuktikan bahwa apa yang S. Paul Kapur sampaikan dalam artikelnya merupakan suatu kesalahan. Sesuai dengan tujuan artikelnya ditulis, Cohen memulai pemaparan artikelnya dengan menjelaskan argumentasi Kapur yang

menurutnya keliru. Kapur menjelaskan bahwa tesis *stability-instability paradox* tidak sesuai dengan kondisi konflik antara India dan Pakistan pada tahun 1999 dan 2001-2002. Kapur berargumen kepemilikan senjata nuklir oleh Indian dan Pakistan menjadi pendorong terjadinya krisis antar keduanya. Menurut Kapur ketika kedua pemimpin negara tersebut memahami bahwa terdapat potensi besar terjadi perang nuklir, maka mereka akan melakukan tindakan agresi konvensional (Kapur, 2008).

Cohen menyanggah argumentasi yang disampaikan oleh Kapur tersebut. Menurut Cohen terdapat *stability-instability paradox*. Pengembangan dan kepemilikan senjata nuklir oleh India dan Pakistan menurut Cohen memang mengakibatkan instabilitas, namun hanya dalam waktu singkat dan dengan eskalasi terbatas. Instabilitas ini justru dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas yang bertahan lama. Menurut Cohen konflik yang sempat terjadi antara India dan Pakistan pada tahun 1999 dan juga pada krisis 10 bulan pada tahun 2002 bukan disebabkan oleh kepemilikan senjata nuklir. Cohen juga membantah argumentasi Kapur yang menyatakan bahwa perilaku revisionis Pakistan yang melakukan agresi ke India tersebut tidak disebabkan oleh adanya persepsi akan terjadi perang nuklir antara India dan Pakistan (Cohen, 2013).

Kepemilikan senjata nuklir justru yang mencegah konflik antara India dan Pakistan semakin meluas. Kepemilikan senjata nuklir dan terdapat persepsi bahwa perang nuklir berpeluang terjadi menyebabkan Presiden Pakistan Pervez Musharraf memilih untuk menurunkan eskalasi konflik dan menghentikan agresi. Keputusan Presiden Pakistan yang melunak ini menurut Cohen karena kesadaran Presiden Pakistan bahwa perang nuklir dengan India

sangat dimungkinkan untuk terjadi dan akan memberikan dampak kehancuran. Cohen menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Pakistan ini memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan Uni Soviet pada era perang dingin. Cohen kemudian menyatakan bahwa tesis *stability-instability paradox* ini juga yang menyebabkan negara-negara revisionis pemilik senjata nuklir seperti Iran dan Korea Utara membatasi tindakan agresifnya. Ancaman serangan balasan atau *retaliations* serta deterrence senjata nuklir menjadi alasan mengapa kepemilikan senjata nuklir akan menurunkan potensi terjadinya perang, termasuk perang nuklir (Cohen, 2013).

Dampak positif proliferasi nuklir bagi stabilitas maupun perdamaian di Asia Selatan juga diutarakan oleh John Arquilla. Arquilla menyampaikan argumentasi tersebut ketika ia melihat dinamika yang terjadi antara India dan Pakistan. Artikel ini ia beri judul "*Nuclear Weapons in South Asia: More May Be Manageable*". Menurut Arquilla proliferasi nuklir yang terjadi di Asia Selatan pada dasarnya merupakan suatu hal yang harus diterima dan bahkan disyukuri. Menurutnya kehadiran senjata nuklir dengan *deterrence* serta resiko *retaliations* yang menghancurkan justru menjadi pengambat bagi Pakistan dan India yang sudah lama berseteru meningkatkan eskalasi konfliknya menjadi perang skala penuh. Selain itu menurut Arquilla, kekhawatiran yang menyatakan bahwa pemanfaatan atau penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara baru akan lebih tidak bertanggungjawab dan meningkatkan potensi perang terutama perang nuklir tidak mampu dibuktikan. India dan Pakistan menurut Arquilla telah mampu membuktikan kebijaksanaan dan tanggungjawab meskipun tergolong

"negara baru" pemilik senjata nuklir (Arquilla, 1997).

Bruce Bueno de Mesquita bersama William H. Riker pada tahun 1982 juga telah menuliskan satu artikel yang membahas mengenai proliferasi nuklir. Artikel tersebut berjudul "*An Assessment of the Merits of Selective Nuclear Proliferation*". Artikel tersebut pada bagian awal menjelaskan bahwa gagasan non-proliferasi nuklir merupakan kebijakan yang didasarkan pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Non-proliferasi nuklir ini dimaksudkan untuk melindungi Amerika Serikat dari potensi serangan nuklir yang berujung pada perang nuklir. Menurut Mesquita dan Riker, sebenarnya Amerika Serikat tidak perlu membatasi kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara lain di dunia (Mesquita & Riker, 1982).

Argumentasi yang dikemukakan oleh Mesquita dan Riker tersebut didasarkan permodelan yang dilakukan. Mesquita dan Riker membuat permodelan sistem internasional yang terdiri dari 10 negara. Ketika didalam sistem internasional hanya terdapat 1 negara yang memiliki senjata nuklir, maka kemungkinan akan terjadi serangan nuklir yang dilakukan negara tersebut. Kemudian ketika setengah negara didalam sistem internasional memiliki senjata nuklir probabilitas terjadinya perang nuklir menurun. Ketika seluruh negara didalam sistem internasional memiliki senjata nuklir maka probabilitas terjadinya perang nuklir menghilang seutuhnya. Hal ini terjadi karena kepemilikan senjata nuklir meningkatkan potensi kehancuran atau *cost of war* yang tinggi sehingga negara akan mengurungkan niatnya melakukan serangan (Mesquita & Riker, 1982).

Artikel terakhir yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk

menjawab rumusan masalah adalah artikel yang berjudul “*Deterrence Signaling Alliance Commitments: Hand-Tying and Sunk Costs in Extended Nuclear Deterrence*”. Artikel ini dituliskan oleh Matthew Fuhrmann dan Todd S. Sechser. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara dalam suatu aliansi mempengaruhi probabilitas konflik. Fuhrmann dan Sechser menyatakan bahwa ketika suatu negara beraliansi dengan negara pemilik senjata nuklir maka negara yang beraliansi tersebut akan lebih kecil probabilitasnya diserang oleh negara lain. Berdasarkan analisa kuantitatif yang dilakukan, negara yang mempunyai komitmen aliansi dari negara pemilik senjata nuklir memiliki peluang diserang lebih kecil 3x lipat dibanding negara yang tidak beraliansi dengan pemilik senjata nuklir (Fuhrmann & Sechser, 2014).

Lebih lanjut Fuhrmann dan Sechser menyatakan bahwa penurunan probabilitas serangan yang ditujukan kepada negara yang beraliansi dengan pemilik senjata nuklir dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, ketika negara pemilik senjata aliansi memutuskan untuk membentuk aliansi dengan negara lain, maka negara tersebut telah memberikan sinyal – eksplisit maupun implisit – kepada musuh potensial bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan *retaliations* menggunakan senjata nuklir. Hal ini menyebabkan deterrence yang dihadirkan senjata nuklir turut dimiliki negara aliansinya (*extended deterrence*) selain itu negara musuh potensial akan menghadapi *cost of war* yang tinggi. Kedua, sinyal dan komitmen yang diberikan negara pemilik senjata nuklir terhadap aliansinya dipercaya akan ditepati. Hal ini dikarenakan jika negara tersebut memillih untuk melanggara

komitmennya maka dimasa yang akan datang negara tersebut akan kesulitan membentuk aliansi dengan negara lain. Dalam kata lain, pembelotan akan menghadirkan kerugian bagi negara pemilik senjata nuklir tersebut. Berdasarkan dua alasan tersebut ketika terjadi proliferasi nuklir maka probabilitas terjadinya konflik antar negara semakin menurun (Fuhrmann & Sechser, 2014).

### **Masih Relevankah Argumentasi Kelompok Proliferasi Nuklir Demi Perdamaian Dunia**

Berdasarkan literatur-literatur yang menyuarkan proliferasi nuklir demi tercapainya stabilitas sistem internasional, maka dapat ditemukan satu kesamaan kesimpulan. Kesamaan tersebut adalah proliferasi nuklir merupakan hal yang seharusnya dibiarkan terjadi. Hal ini dikarenakan proliferasi nuklir akan mampu menciptakan stabilitas internasional. Literatur-literatur tersebut menyatakan bahwa kekhawatiran kelompok yang menghendaki non-proliferasi tidak terbukti dan memiliki kesalahan pemikiran. Perang nuklir sebagaimana yang diduga kelompok non-proliferasi akan terjadi jika nuklir dimiliki oleh banyak negara, tidak akan terjadi atau minimal semakin menurun probabilitasnya.

Penurunan probabilitas terjadinya konflik antar negara maupun perang nuklir yang disebabkan proliferasi nuklir ini jika merujuk literature-literatur tersebut didasarkan pada beberapa hal. Pertama, senjata nuklir dengan daya hancur yang sangat massif akan menghadirkan *deterrence* yang sangat baik. *Deterrence* senjata nuklir bahkan disebut akan berfungsi atau berguna meskipun kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara sangat sedikit atau tidak seimbang dengan negara

musuhnya. Kedua, masih terkait dengan *deterrence* dari senjata nuklir, kehadiran senjata nuklir menyebabkan *cost of war* yang harus ditanggung suatu negara sangat besar ketika memutuskan untuk berperang, bahkan ketika negara tersebut memenangi peperangan. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan serangan pertama yang dilakukan dapat menghancurkan senjata nuklir musuh serta bayang-bayang *retaliations*. *Cost of war* yang sangat tinggi ini juga yang akan menghalangi negara revisionist untuk melakukan serangan nuklir.

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang disebutkan sebelumnya, apakah argumentasi pro-proliferasi nuklir masih sesuai dengan konteks dunia internasional saat ini? Maka jawabannya adalah masih sesuai dengan konteks dunia internasional saat ini. Hal ini dikarenakan meski proliferasi nuklir yang diartikan dengan penyebaran kepemilikan senjata nuklir secara empirik telah terjadi, prediksi pendukung non-proliferasi nuklir tidak terbukti. Saat ini senjata nuklir tidak hanya dimiliki oleh negara-negara yang telah diatur dalam perjanjian NPT. Negara seperti Israel, India, Korea Utara, Pakistan telah terbukti memiliki senjata nuklir (Asal & Beardsley, 2007). Namun berdasarkan data empirik juga, hingga saat ini tidak pernah terjadi perang nuklir. Bahkan menurut data yang dirilis oleh Uppsala Conflict Data Program, semenjak berakhirnya perang dingin konflik yang terjadi di dunia tidak lagi dalam bentuk *interstate war* melainkan didominasi oleh *intrastate war* (Uppsala Conflict Data Program, 2020). Hal ini sesuai dengan argumentasi pemikir pro-proliferasi nuklir bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh banyak negara tidak akan menyebabkan perang nuklir dan bahkan bisa menciptakan stabilitas internasional.

Selain itu, kekhawatiran proliferasi nuklir akan digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh pemimpin negara otoriter atau revisionis juga tebantahkan. Hal ini terbukti dengan kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara. Korea Utara yang sering disebut sebagai negara revisionist dan dipimpin oleh pemerintah otoriter hingga saat ini tidak pernah melakukan serangan nuklir kepada musuh-musuhnya. Bahkan Korea Utara hingga saat ini juga tidak pernah terlibat perang terbuka dengan negara manapun, termasuk Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara sebagai pemilik senjata nuklir juga tidak pernah melancarkan serangan kepada negara-negara aliansi Amerika Serikat didalam maupun diluar NATO. Hal ini juga sesuai dengan argumentasi yang menyatakan bahwa *deterrence* yang dihadirkan oleh senjata nuklir suatu negara akan turut melindungi aliansi negara tersebut (Fuhrmann & Sechser, 2014).

Kepemilikan senjata nuklir oleh dua negara yang memiliki sejarah panjang konflik juga terbukti tidak mendorong terjadinya perang berskala penuh, terlebih lagi perang nuklir. Sebagai contohnya sebagaimana telah diulas di berbagai literatur diatas adalah dalam kasus India dan Pakistan. Meskipun Pakistan pernah melakukan aksi militer terhadap India pada tahun 1999 dan 2001-2002, kondisi tersebut tidak bereskalasi menjadi perang berskala penuh maupun perang nuklir. Jika Cohen dalam artikelnya menggunakan contoh kasus peristiwa Kargil 1999 dan konflik 2001-2002, maka pembuktian dapat kembali terlihat pada tahun 2019. Ketika tensi antara India dan Pakistan meningkat pada tahun 2019, Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan menyatakan tidak akan memulai perang dengan India

karena keduanya merupakan negara pemilik senjata nuklir. Khan juga menyatakan bahwa keduanya akan dihadapkan pada kehanduran yang massif jika memutuskan untuk memulai perang (The Economic Times, 2019).

### **Kesimpulan**

Argumentasi yang menyatakan proliferasi nuklir dapat menciptakan dan menjaga stabilitas sistem internasional telah banyak disampaikan oleh berbagai tokoh. Salah satu artikel yang paling banyak menarik perhatian dan dirujuk adalah artikel yang dipublikasikan pada tahun 1981 oleh Kenneth Waltz. Berbagai literature menyatakan bahwa *deterrence* serta *cost of war* yang dihadirkan senjata nuklir dapat menghilangkan atau meminimalisir probabilitas perang. Jika merujuk pada data-data empirik maka dapat dikatakan argumentasi yang disampaikan masih sangat relevan dengan konteks dunia internasional saat ini. Meskipun proliferasi nuklir telah terjadi perang nuklir tidak pernah terjadi serta *interstate war* sangat jarang terjadi dalam sistem internasional.

### **Daftar Pustaka**

- Arquilla, J. (1997). Nuclear weapons in South Asia: More may be manageable. *Comparative Strategy*, 16(1), 13–31. <https://doi.org/10.1080/01495939708403090>
- Asal, V., & Beardsley, K. (2007). Proliferation and international crisis behavior. *Journal of Peace Research*, 44(2), 139–155. <https://doi.org/10.1177/0022343307075118>
- Cohen, M. D. (2013). How Nuclear South Asia is Like Cold War Europe: The Stability-Instability Paradox Revisited. *Nonproliferation Review*, 20(3), 433–451. <https://doi.org/10.1080/10736700.2013.857126>
- Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. (n.d.). *Nuclear Explosion*. Ready. <https://www.ready.gov/nuclear-explosion>
- Fuhrmann, M., & Sechser, T. S. (2014). Deterrence Signaling Alliance Commitments: Hand-Tying and Sunk Costs in Extended Nuclear Deterrence. *American Journal of Political Science*, 58(4), 919–935.
- Gartzke, E., & Jo, D. J. (2009). Bargaining, nuclear proliferation, and interstate disputes. *Journal of Conflict Resolution*, 53(2), 209–233. <https://doi.org/10.1177/0022002708330289>
- Kapur, S. P. (2008). Ten Years of Instability in a Nuclear South Asia. *International Security*, 33(2), 71–94. <http://www.jstor.org/stable/40207132>
- Mearsheimer, J. J. (1984). Nuclear Weapons and Deterrence in Europe. *International Security*, 9(3), 19–46.
- Mearsheimer, J. J. (1993). The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent. *Foreign Affairs*, 72(3), 50. <https://doi.org/10.2307/20045622>
- Mesquita, B. B. de, & Riker, W. H. (1982). An Assessment of the Merits of Selective Nuclear Proliferation. *The Journal of Conflict Resolution*, 26(2), 283–306.
- Suzuki, A. (2015). Is more better or worse? New empirics on nuclear proliferation and interstate conflict by random forests. *Research and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.1177/2053168015589625>

- The Economic Times. (2019). *After nuclear threat, Imran Khan now says Pakistan will never start war with India*. The Economic Times. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pakistan-will-never-ever-start-war-with-india-imran-khan/articleshow/70951219.cms?from=mdr>
- Tomonaga, M. (2019). The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki: A Summary of the Human Consequences, 1945-2018, and Lessons for Homo sapiens to End the Nuclear Weapon Age . *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 2(2), 491–517.  
<https://doi.org/10.1080/25751654.2019.1681226>
- Uppsala Conflict Data Program. (2020). *Uppsala Conflict Data Program*. UCDP Charts, Graphs and Maps. <https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/charts-graphs-and-maps/>
- Waltz, K. (1981). The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better. *The Adelphi Papers*, 21(171), 1–32.
- Waltz, K. (1990). Nuclear Myths and Political Realities. *The American Political Science Review*, 84(3), 731–745.